
**STRATEGI PEMERINTAHAN BERGAYA WIRAUSAHA DALAM
MEMBANGUN KEMANDIRIAN MASYARAKAT
DI DESA PULAU HARAPAN**

Baharuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Muhammadiyah Sinjai –Sulawesi Selatan

Abstrak: Latar belakang penelitian ini berdasarkan Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (Kwalitatif). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Strategi pemerintah yang bergaya wirausaha dalam membangun kemandirian Masyarakat. Pemerintah merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan mengurus masalah yang ada dalam masyarakat, demi terciptanya suatu kehidupan yang adil dan makmur. Peran serta dari pemerintah dalam proses perancangan program kerja pembangunan tidak lepas dari tugas dan fungsi yang di amanatkan oleh Undang-undang. Sehingga peran serta dari pemerintah dan masyarakat tidak bisa dianggap sebelah mata saja. Maka untuk dalam rangka memaksimalkan peran pemerintah Desa dalam proses pembangunan harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan program pembangunan suatu Desa. Dalam proses ini pemerintah desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan memiliki langkah-langkah atau cara-cara yang dianggap ampuh untuk mempengaruhi keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan Desa. Dari hasil penelitian bahwa strategi yang di buat oleh pemerintah Desa Pulau Harapan dianggap belum maksimal karena masih banyaknya program kerja yang diusulkan masyarakat yang bukan merupakan program kerja desa.

keywords: *Strateti Pemerintah, Wirausaha, Kemandiian Masyarakat,*

Pendahuluan

UU Desa telah menegaskan pengakuan negara atas hak-hak konstitusional desa sebagai satuan sosial dan pemerintahan yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional, tidak lagi diperlakukan sebagai bagian dari pemerintah supra desa. Implikasi dari kontruksi ini, negara mengakui otonomi desa untuk mengurus urusannya, termasuk kewenangan yang didapatkan dari asal-usul desa seperti hak ulayat yang diwadahi dalam format desa adat, serta mengelola (bukan menerima) berbagai urusan yang diberikan atau ditugaskan oleh pemerintah supra desa di wilayahnya.

Format baru pengakuan eksistensi desa ini sekaligus diikuti oleh pengembangan berbagai sumber dana penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain kewenangan untuk menggali Pendapatan Asli Desa (termasuk pengusaha atas aset dan kekayaan desa), Desa juga dipastikan akan mendapatkan sumber penerimaan lain dari APBD Kabupaten/Kota berupa Alokasi Dana Desa dan bagian hasil pajak dan retribusi daerah dan APBN berupa Dana Desa. Selain itu, desa juga berpeluang

mendapatkan sumber penerimaan lain dari bantuan keuangan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan sumber lainnya yang sah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 6 ayat 3 Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: Pasar Desa; pembentukan dan pengembangan BUM Desa; penguatan permodalan BUM Desa; pembibitan tanaman pangan; penggilingan padi; lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengelolaan usaha hutan Desa; kolam ikan dan pembenihan ikan; kapal penangkap ikan; *cold storage* (gudang pendingin); tempat pelelangan ikan; tambak garam; kandang ternak; instalasi biogas; mesin pakan ternak; sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

Pemberdayaan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 6 ayat 5 bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna;
- c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. Kelompok perempuan,
 4. Kelompok tani,
 5. Kelompok masyarakat miskin,
 6. Kelompok nelayan,
 7. Kelompok pengrajin,
 8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 9. Kelompok pemuda; dan
 10. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Kegagalan dalam merespon Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa oleh karena disebabkan kurangnya kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang maksimal dari pemerintah bisa menciptakan sumber konflik baru antara pemerintah dengan masyarakat yang pada akhirnya bisa mengganggu legitimasi dan jalannya roda pemerintahan.

Tinjauan Pustaka

Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan yang diserahkan pada pengelolaan pemerintah desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Sedangkan penyelenggara Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sesuai pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014, Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bidang pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:

- a. Tambatan perahu;
- b. Jalan pemukiman;
- c. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
- d. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
- e. Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
- f. Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

Sedangkan Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

- a. Pasar Desa;
- b. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
- c. Penguatan permodalan BUM Desa;
- d. Pembibitan tanaman pangan;
- e. Penggilingan padi;
- f. Lumbung Desa;
- g. Pembukaan lahan pertanian;
- h. Pengelolaan usaha hutan Desa;

- i. Kolam ikan dan pembenihan ikan;
- j. Kapal penangkap ikan;
- k. *Cold storage* (gudang pendingin);
- l. Tempat pelelangan ikan;
- m. Tambak garam;
- n. Kandang ternak;
- o. Instalasi biogas;
- p. Mesin pakan ternak;
- q. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi dilakukan usaha-usaha pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
 - a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa;
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1) Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3) Kelompok perempuan,
 - 4) Kelompok tani,
 - 5) Kelompok masyarakat miskin,
 - 6) Kelompok nelayan,
 - 7) Kelompok pengrajin,
 - 8) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - 9) Kelompok pemuda; dan
 - 10) Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Amanah regulasi ini merupakan tantangan bagi pelaku kebijakan dalam konteks implementasi Undang-undang Desa. Keadaan ini membutuhkan pemahan penyelenggaraan pemerintahan agar memiliki *Enterpreneurial Government* (Pemerintahan bergaya Wirausaha) sehingga tercipta kemandirian desa.

1. *Enterpreneurial Government* (Pemerintahan bergaya Wirausaha)

Isu tentang perlunya birokrasi pemerintahan dikelola dengan prinsip kewirausahaan sebenarnya bukan hal baru dalam di dunia. Di Indonesiapun konsep dan gagasan tersebut mulai bergema diera tahun 95-an tatkala beberapa orang pemerhati masalah birokrasi menyuarkan perlunya birokrasi pemerintah merubah orientasi menjadi lembaga yang berjiwa wirausaha. Hal ini dikemukakan oleh Tjokrowinoto (1992) Tantangan yang harus

dihadapi birokrasi adalah, bagaimana dapat memainkan perannya yang optimal didalam konteks, disatu pihak, menguatnya peranan sektor swasta sebagai akibat dari proses liberalisasi tadi, dan dipihak lain adanya tuntutan normative untuk mewujudkan keadilan sosial dan menanggulangi kemiskinan. Peranan ini akan dapat dilaksanakan apabila birokrasi memainkan peranannya dalam kapasitas sebagai *entrepreneurial government* dan *empowering government*.

Osborne (1995) mengungkapkan sesuatu yang perlu menjadi pegangan dalam menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan bahwa organisasi bisnis tidak bisa disamakan dengan lembaga pemerintah dan memang terdapat banyak perbedaan satu dengan yang lainnya. Pemerintah tidak dapat dijalankan seperti sebuah bisnis, tentu saja tidak berarti bahwa pemerintah tidak bisa bergaya wirausaha.

2. Prinsip-prinsip pemerintahan wirausaha

Selanjutnya Osborne dan Gaebler (1995) mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan wirausaha yaitu :

a. Pemerintahan Katalis (Mengarahkan Ketimbang Mengayuh).

Pemerintahan katalis menghendaki peran pemerintah sebagai aktor dan pelaksana urusan publik perlu dikurangi dan pemerintah sebagai pengarah serta memusatkan perenannya dalam membuat kebijakan, peraturan dan undang-undang. Redefenisi peran pemerintah perlu dilakukan karena selama ini pemerintah terlalu memonopoli semua urusan publik. Pembagian peran yang proporsional dan komplementer antara pemerintah, pasar dan masyarakat perlu dilakukan. Hal ini merupakan wujud dari *Good Governance* yang menunjukkan hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*) (LAN; 2000, 7). Adapun cara yang bisa dilakukan dalam bentuk kontrak, voucher, hadiah, insentif pajak, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk membantu organisasi publik mencapai tujuan, memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai efisiensi, efektifitas, persamaan, pertanggung jawaban dan fleksibilitas.

b. Pemerintahan Milik Masyarakat (Memberi Wewenang Ketimbang Melayani).

Pemerintahan milik masyarakat diartikan sebagai pengalihan wewenang kontrol pemerintah ketangan masyarakat dan adanya perubahan misi dari pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat dan bukan sebagai pelayanan sehingga fungsi utama dari pemerintah adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil kendali atas penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dalam konsep ini masyarakat tidak dilihat semata-mata sebagai konsumen pelayanan publik yang pasif, tetapi juga dilihat sebagai produsen pelayanan publik yang potensial dan unggul.

Dengan adanya kontrol dari masyarakat birokrat akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Untuk itu pemberdayaan masyarakat harus menjadi misi dan orientasi dari program dan kegiatan pemerintah.

c. Pemerintahan Yang Kompetitif (Menyuntikkan Persaingan Ke Dalam Pemberian Pelayanan).

Pemerintahan kompetitif mensyaratkan persaingan diantara para penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Pemerintah dikenal sangat monopolistik dalam menyelenggarakan urusan publik, akibatnya terjadi inefisiensi, kelambanan dan buruknya kualitas pelayanan. Untuk itu pemerintah harus mampu merangsang, mendorong dan menciptakan sistem kompetisi antar berbagai pelaku yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kompetisi disini tidak terbatas pada kompetisi antara pemerintah dengan swasta tetapi bisa juga antar swasta atau bahkan antara pemerintah dengan pemerintah. Kompetisi harus dipahami sebagai kekuatan fundamental untuk memaksa badan pemerintah dalam melakukan perbaikan. Kompetisi mempunyai beberapa keuntungan; pertama, terjadi efisiensi yang lebih besar; kedua, memaksa monopoli pemerintah atau swasta untuk merespon segala kebutuhan masyarakatnya; ketiga, kompetisi menghargai inovasi dan keempat, kompetisi membangkitkan harga diri dan semangat juang birokrat.

d. Pemerintahan Yang Digerakkan Oleh Misi (Mengubah Organisasi Yang Digerakkan Oleh Peraturan).

Pemerintah yang berorientasi misi dilakukan dengan deregulasi internal, menghapus banyak peraturan internal dan secara radikal meyederhanakan sistem administrasi. Bryson (2001:23) memberikan pandangannya tentang perencanaan strategis yang harus dimiliki oleh organisasi nirlaba dengan berawal dari adanya misi yang jelas, hal ini dimaksudkan karena sistem perencanaan lama tidak mampu lagi merespon perubahan yang terjadi begitu cepat. Pemerintah hanya bisa adaptif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat, kalau pemerintah berorientasi pada misi. Akuntabilitas lebih didasarkan pada pencapaian misi dan bukan kepatuhan pada aturan karena kenyataan menunjukkan bahwa peraturan selalu ketinggalan dibandingkan dengan dinamika masyarakat (Dwiyanto,2001). Ada beberapa cara untuk tidak mensakralkan peraturan; pertama, *Sunset Law* (undang-undang matahari terbenam) yaitu menetapkan tanggal kapan suatu program atau peraturan akan berakhir jika tidak disahkan kembali sehingga mengharuskan dilakukannya peninjauan kembali; kedua, *Review Commissions* (komisi peninjauan) yang memeriksa setiap peraturan atau kegiatan pemerintah yang tidak sesuai dengan

dinamika yang terjadi; ketiga, *Zero Based Budget* (*anggaran berbasis nol*) mengharuskan birokrasi pemerintah memberikan alasan atas setiap elemen anggaran atau berdasarkan *out put* yang dihasilkan. Organisasi yang digerakkan oleh misi memberi kebebasan kepada karyawannya dalam mewujudkan misi organisasi dengan metode paling efektif dalam batas-batas legal. Hal ini memiliki keunggulan yang nyata antara lain:

- 1) Organisasi yang digerakkan oleh misi lebih efisien ketimbang organisasi yang digerakkan oleh peraturan.
- 2) Organisasi yang digerakkan misi juga lebih efektif ketimbang organisasi yang digerakkan oleh peraturan.
- 3) Organisasi yang digerakkan oleh misi lebih inovatif ketimbang yang digerakkan oleh peraturan.
- 4) Organisasi yang digerakkan oleh misi lebih flexibel ketimbang yang digerakkan peraturan.
- 5) Organisasi yang digerakkan oleh misi mempunyai semangat lebih tinggi ketimbang yang digerakkan oleh peraturan.
- 6) Pemerintahan berorientasi pada hasil
- 7) Pemerintahan berorientasi pada pelanggan.
- 8) Pemerintahan Wirausaha.
- 9) Pemerintah Yang Antisipatif
- 10) Pemerintahan Desentralisasi.
- 11) Pemerintah Berorientasi Pasar

Konsep dan ide tentang jiwa wirausaha yang ditelah dikemukakan oleh Osborne tersebut tentunya tidak semudah dan sesederhana yang digambarkan. Relevansi diterapkannya ide tersebut di desa tentu saja merupakan tanda tanya besar yang perlu dijawab. Pengembangan *entrepreneurial government* atau Pemerintahan bergaya wirausaha dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pada penciptaan pemerintah yang efisien, tanggap dan akuntabel.

Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sering pula disebut metode fenomenologis. Menurut Moleong, (2013:9) Pendekatan fenomenologis merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologis, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Pendekatan fenomenologis hampir serupa dengan pendekatan *hermeneutics* yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi.

Sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif maka penelitian ini bersumber pada pengamatan kualitatif dilapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Ketepatan interpretasi bergantung pada ketajaman analisa, objektivitas, sistematik, dan sistemik maka penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif analitik.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Secara umum sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua(Moleong, 2012) yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan sumber yang tidak tertulis atau data lapangan melalui wawancara mendalam kepada informan kunci atau melalui teknik *snoeball*, yaitu pendalaman informasi berdasarkan data yang dibutuhkan. Untuk pendalaman informasi peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam dengan informan.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu diperoleh melalui sumber-sumber tertulis. Strategi ini dilakukan untuk dapat memahami sebuah abstraktif tentang tujuan penelitian yang didukung oleh data yang dikumpulkan dan saling berhubungan sehingga sifat penekanannya adalah dari kesimpulan umum ke khusus.

Sedangkan jenis data yang dikumpulkan melalui kedua sumber data tersebut dapat berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai mendalam. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video atau audio tape, pengambilan foto atau film. Untuk sumber tertulis, dilihat dari sumber data berupa bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah, koran, arsip, dokumen pribadi dan atau dokumen resmi.

Informan Penelitian

Adapun informan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai.
3. Badan Perpusyawarata Desa dan Badan Usaha Milik Desa.
4. Masyarakat Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai.

Prosedur Pengumpulan Data Penelitian

Menurut John W. Creswell (Edisi ke III 2013) langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protocol untuk merekam/mencatat informasi.

1. Observasi kualitatif

Merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non partisipan hingga utuh.

2. Wawancara kualitatif

Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (*Interview* dalam kelompok tertentu). Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan.

3. Dokumen-dokumen kualitatif

Selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti buku harian, diary, surat, e-mail).

4. Materi audio dan visual

Data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, videotape, atau segala jenis suara atau bunyi.

Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data (Sugiono; 2011:333 dalam Eri Bonggasau; 2015) mengemukakan bahwa teknis analisis data adalah proses mencari data secara sistematis, data yang diperoleh dari wawancara lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mempelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami baik diri sendiri maupun orang lain.

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Mile dan Huberman yang mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduksi, data display, conclusion dan verification (Sugiono, 2011:334 dalam Eri Bonggasau; 2015).

Teknik analisis interaktif ini dijalankan dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dilapangan. Dalam reduksi

data peneliti menerjemahkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga akhirnya kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi oleh peneliti.

2. Display data atau Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, lowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penyajian data, peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun, yang memberikan dasar kebijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang akan terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.
3. Conclusion dan Verification atau penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti pada suatu tinjauan ulang catatan lapangan atau melihat kembali salinan suatu temuan yang disimpan dalam perangkat salinan yang lain.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)Desa Pulau Harapan, membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana prioritas program dan kegiatan-kegiatan mendesak untuk dilakukan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya Sikap dan Perilaku sehingga dapat mendorong terwujudnya perogram revolusi Mental terhadap masyarakat Pedesaan.

Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Pulau harapan akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah desa.

Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa Pulau Harapan, dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 1
Penduduk Desa Pulau Harapan
Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2015 s.d 2016

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Tidak Tamat Sekolah SD	85
2.	Tamat Sekolah SD	577
3.	Tamat Sekolah SLTP	446
4.	Tamat SMU	107
5.	Tamat Akademi/DI/DII/DIII	1
6.	Tamat Strata I	25
7.	Tamat Strata II	0

Sumber : Profil Desa Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, sehingga menyebabkan Kurangnya Tenaga Pengajar yang berasal dari Desa Pulau Sembilan yang bisa dilibatkan dalam pengelolaan pendidikan contohnya menjadi tenaga pendidik/guruserta tingginya angka putus sekolah. Permasalah-permasalahan pendidikan harus diatasi oleh pemerintah desa dengan melihat potensi pendidikan yang ada di Desa salah satunya adalah telah tersedianya sarana prasarana pendidikan mulai dari Paud sampai dengan SMK, ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2
Jumlah Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016

No	TINGKATAN SEKOLAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH SISWA
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	15	11	26 Siswa
2.	Taman Kanak-Kanak	27	30	47Siswa
3.	Sekolah Dasar	129	128	257 Siswa
4.	SMP	58	79	147 Siswa
5.	SMU / SMK / MA	51	53	104 Siswa
6.	Diploma I, II, III	0	1	0 Mahasiswa
7.	Strata Satu dan dua (S1, S2, S3)	0	0	0 Mahasiswa

Sumber : Profil Desa Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih kurangnya masyarakat yang Ingin melanjutkan pendidikan pada Tingkatan Diploma dan Strata Satu atau dua, ini dibuktikan bahwa pada tahun 2016 hanya 1 orang yang melanjutkan Program Diploma dan Tidak ada masyarakat yang melanjutkan Strata Satu dan dua padahal Lulusan S1 sangat dibutuhkan dalam pengembangan pada semua tingkatan pendidikan yang ada.

Dari beberapa permasalahan pendidikan diatas pada tanggal 04 april 2017 melalui rapat koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat disepakati beberapa program strategis dibidang pendidikan diantaranya :

- a. Peningkatan Kesadaran masyarakat secara umum dan kesadaran Orang Tua Khususnya tentang pentingnya pendidikan dan Berperan Aktif dalam peningkatan mutu Pendidikan.
- b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan khususnya pendidikan Usia Dini, SD,SMP, SMK dan Perguruan Tinggi.
- c. Penyediaan sarana transportasi laut bagi siswa yang berada diPulau Liang-liang.

Program strategis pemerintah desa Pulau Harapan yang ditawarkan kepada masyarakat ternyata belum mampu menjawab semua permasalahan dibidang pendidikan Hal ini didukung dari hasil wawancara peneliti dengan bapak **Ir. Mikyal Arsyad, S. Pd. MP**, salah satu tokoh masyarakat yang ditugaskan oleh pemerintah menjadi kepala sekolah SMK Negeri 4 di Desa pulau harapan yang mengatakan bahwa :

“Rendahnya kualitas pendidikan di Pulau Harapan dikarenakan banyaknya masyarakat yang langsung melibatkan anaknya untuk membantu pekerjaan orang tua yang mayoritas sebagai nelayan dari pada mendorong anaknya untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ini disebabkan oleh faktor ekonomi dan masih kurangnya Guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil bersedia untuk ditempatkan dipulau harapan dikarenakan akses transportasi yang sangat sulit serta letak geografis berada didaerah yang dikelilingi oleh laut, salah satu Contohnya SMK Negeri 4 Sinjai yang telah berdiri selama 05 tahun sampai saat sekarang ini hanya memilik 2 PNS”. (Wawancara Tanggal 22 Mei 2017).

Pendidikan menjadi hal yang sebaiknya kita juga perlu ketahui untuk menambah wawasan kita terhadap hal yang selalu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, karena kita selalu melewati proses pendidikan maka oleh sebab itulah kita sebagai pelaku harus paham juga apa pengertian pendidikan itu sendiri. *Pendidikan* bukan hanya untuk di ketahui melainkan dengan memahaminya lalu berusaha untuk menjalankan prosesnya berdasarkan apa yang memang tertuang dalam pendidikan

tersebut. Kita terlalu sering melihat berbagai kejadian nyata yang mencoreng nama baik dari pendidikan mungkin salah satu penyebabnya adalah dikarenakan mereka tidak menguasai nilai-nilai apa yang di artikan dalam kata pendidikan itu sendiri.

Keputusan dalam bidang pendidikan yang telah diprogramkan oleh pemerintah Desa Pulau Harapan tentu membutuhkan kegiatan sosialisasi dimasyarakat, agar masyarakat memahami dan sejalan dengan keinginan mereka. Dalam hal ini sosialisasi tentang pendidikan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa.

Sebagaimana dikatakan oleh Atmosoeparto : (Kisdarto. 2000:2012) *Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan yang fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia* dalam bentuk sosialisasi.

Sebagai bagian dari proses pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan harus mendapat perhatian penting. Desa yang tidak memiliki sarana pendidikan pasti mengalami kendala pada proses pencapaian hasil pendidikan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Desa Pulau Sembilan yang telah memiliki fasilitas pendidikan mulai dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bagian terpenting yang ada di Desa.

2. Bidang Perekonomian Desa

Secara umum kondisi perekonomian Desa Pulau Harapanditopang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti:PNS/TNI/Polri, Nelayan, Guru swasta, Guru Honor, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, tukang kayu, perakitan kapal dan lain-lain. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa Pulau Harapan
Menurut Mata Pencaharian
Tahun 2016

No	Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1	Buruh Nelayan	175	
2	Nelayan	1858	
3	Peternak	132	
4	Pedagang	57	
5	Tukang Kayu	11	
6	Tukang batu	5	
7	Penjahit	5	
8	Pns	48	
9	Pensiunan	3	
10.	Tni/Polri	-	

11.	Perangkat desa	9	
12.	Pengrajin	5	
13.	Indutri kecil	5	
14.	Lain-lain	-	
	JUMLAH	2.263	

Sumber : *Profil Desa Tahun 2016*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas pekerjaan penduduk adalah Nelayan, jadi program strategis yang dirancang oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian desa terfokus pada bidang perikanan diantaranya :

- a. Merubah pola Fikir masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan, dengan mendorong kesadaran Masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kawasan Kelautan, melalui penyuluhan dengan Dinasterkait yang dilaksanakan secara aktif dan berkelanjutan.
- b. Pemberian bantuan alat- alat yang dapat membantu masyarakat dalam kegiatan usaha perikanan.
- c. Pembangunan dan pemeliharaan Dermaga Kapal Nelayan.

Dari beberapa program pemerintah desa dalam bidang pengembangan perekonomian masyarakat ternyata belum mampu menjawab beberapa keluhan masyarakat. Hal ini didukung dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak **Muh.Aming**, salah satu tokoh masyarakat yang merupakan ketua Kelompok Tani Nelayan mengatakan bahwa :

“Seharusnya pemerintah desa dalam merancang program kerja strategis harus melihat kebutuhan masyarakat yang mayoritas kehidupan mereka tergantung dari hasil laut, salah satu contoh saat ini banyak bantuan-bantuan hibah dari pemerintah berupa keramba jaring apung yang diberikan kepada masyarakat tidak termamfaatkan secara maksimal ini diakibatkan kurangnya pendampingan yang dilakukan baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa, jadi saya menawarkan kepada pemerintah desa agar kiranya dapat merancang program kerja pendampingan dan penyuluhan secara maksimal pada bidang perikanan agar bantuan hibah pemerintah dapat dimamfaatkan secara maksimal sehingga membantu pengembangan ekonomi masyarakat”. (Wawancara Tanggal 22 Mei 2017).

Dari hasil wawancara diatas peneliti melihat bahwa ada beberapa bantuan hibah pemerintah yang belum mampu dimamfaatkan secara maksimal oleh masyarakat atau aparat desa. Salah satu contoh adalah keramba jaring apung dimana pemerintah pusat memberikan bantuan pengadaan keramba hampir setiap tahunnya tetapi tidak mampu digunakan secara optimal ini dikarenakan kurangnya

pendampingan/penyuluhan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat tentang mekanisme pemanfaatan keramba jaring apung.

3. Bidang Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan yang ada di desa Pulau harapan yaitu :

- a. Puskesmas : 1 Buah
- b. Polindes : 1 Buah
- c. Posyandu : 1 Buah
- d. Tenaga Dokter : 0
- e. Tenaga Kesehatan (Bidan) : 3 Orang

Adapun Puskesmas Kecamatan Pulau Sembilan berada Di Dusun kambuno Barat dan Polindes di Dusun Pulau liang-Liang, Sedangkan Posyandu terletak di masing-masing Dusun.

Program Strategis pemerintah desa dibidang kesehatan diataranya :

- a. Aktif melaksanakan Penyuluhan dan sosialisasi tentang kesehatan dan kebersihan lingkungan. Ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat pada persoalan sampah dan banyak masyarakat yang membuang sampah langsung kelaut.
- b. Pembangunan sarana dan Prasarana Posyandu, Pos Ukk Dan Pos Bindu serta pemberian makanan Tambahan bagi anak yang baliata Kurang Gizi.
- c. Penyediaan Fasilitas Ambulance Desa dalam bentuk Kapal.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Desa Pulau Harapan yang merupakan ibukota Kecamatan Pulau Sembilan sampai saat sekarang ini belum memiliki tenaga ahli dibidang kesehatan (Dokter). Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat **Rasmawati** yang orang tuanya mengalami penyakit dalam yang sampai saat sekarang ini hanya menggunakan pengobatan tradisonal mengatan bahwa :

“Pemerintah Desa yang telah mendapatkan dana desa yang begitu banyak seharusnya dapat merancang program kerja dibidang kesehatan dengan mendatangkan tenaga ahli (Dokter) kalau bisa setiap minggu agar warga masyarakat yang mengalami penyakit yang tidak dapat diobati oleh bidan itu bisa memeriksakan dirinya pada dokter yang datang dipulau kami, karena kalau kami yang mau kekecamatan sinjai utara itu menggunakan biaya yang tidak sedikit contohnya biaya trasfortasi dari pulau ke ibukota kecamatan sinjai utara yang disana ada rumah sakit, serta rata-rata orang pulau tidak mempunyai keluarga yang bisa ditempati menginap sehingga harus mencari penginapan terdekat dari rumah sakit kalau kami kesana, bukanya semua ini akan membebani kami pada segi ekonomi”. (Wawancara Tanggal 22 Mei 2017)

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat pada bidang kesehatan adalah bagaimana aparat desa mampu untuk mendatangkan

tenaga ahli bidang kesehatan (Dokter) sehingga masyarakat tidak lagi ke kecamatan Sinjai Utara untuk mengobati beberapa penyakit yang harus ditangani oleh Dokter Ahli.

4. Bidang Keagamaan

Dilihat dari penduduknya, Desa Pulau harapan mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan.

a. Sarana Ibadah

Sarana ibadah di Desa Pulau Harapan terdiri dari :

- 1). Musholla : 1 buah
- 2). Masjid : 2 buah

b. Data Masjid, TPQ, dan Data Kelompok Pengajian yang ada di Desa Pulau Harapan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Data Masjid

No	Nama Masjid	Lokasi	Ketua Takmir	Status /Luas Tanah	Berdiri Tahun	Ket
1.	AL JAZAIRIAH	Dusun Kambuno Barat	H. Adhan	Hibah	1962	
2.	BABURAHMAN	Dusun Kambuno Timur	Saefuddi	Hibah	1982	
3.	AL-BADIYAT	Dusun Pulau Liang-liang	Andi Aziz	Hibah	1963	

Sumber : Profil Desa Tahun 2016

Tabel 5
Data TPQ di Desa Pulau Harapan

No	Nama TPQ	Lokasi	Pengajar	Status Tanah	Berdiri Tahun	Ket
1	Tk/TPA AL-Jazairiah	Dusun Kambuno Barat	3 Orang	Hibah	2001	48 santri

Sumber : Profil Desa Tahun 2016

Tabel 6
Data Kelompok pengajian

No	Nama Klp Pengajian	Jumlah siswa	Alamat	Ket
1.	Mihaya	12 Siswa	Dusun kambuno selatan	
2.	Harlina	22 Siswa	Dusun kambuno selatan	
3.	suriati	28 Siswa	Dusun Kambuno selatan	
4.	Ummiati	24 Siswa	Dusun kambuno selatan	
5.	Marwati	16 Siswa	Dusun kambuno selatan	
6.	St. Londe	3 Siswa	Dusun kambuno selatan	
7.	Suryani	14 Siswa	Dusun kambuno Timur	
8.	Haeria	22 Siswa	Dusun kambuno Timur	
9.	Sukaena	15 Siswa	Dusun kambuno Timur	
10.	Sairah	24 Siswa	Dusun kambuno Timur	
11.	Zakaria	16 Siswa	Dusun kambuno Timur	
12.	Patiman	13 Siswa	Dusun P.Liang-Liang	
13.	Suhti	14 Siswa	Dusun P.Liang-Liang	
14.	Dg. masyinnong	12 Siswa	Dusun P.Liang-Liang	
15.	Rela	20 Siswa	Dusun P.Liang-Liang	

Sumber : Profil Desa Tahun 2016.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengembangan ilmu keagamaan dibidang baca tulis Al-Qur'an didesa pulau harapan berjalan sangat didukung oleh masyarakat ini dapat bahwa masih banyaknya tempat pengajian yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat selain tempat pengajian yang dikelola secara kelompok/TK-TPA.

Program Pemerintah Desa dibidang keagamaan diantaranya :

- 1) Peningkatan Pengetahuan agama dengan pembentukan majelis Taklim dan Pengaktifan Remaja Mesjid.
- 2) Kegiatan- kegiatan keagamaan dan dialog interaktif dengan seluruh lapisan masyarakat dengan melibatkan Majlis Taklim dan Remaja Mesjid.
- 3) Bantuan fasilitas untuk keperluan tempat ibadah atau Pelaksanaan Ibadah.

- 4) Peningkatan dan pemeliharaan etika dan adat istiadat yang ada dan Tumbuh di masyarakat.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa belum adanya program pemerintah desa terfokus pada peningkatan fasilitas Tempat Baca Tulis-Al-Qur'an dan peningkatan kesejahteraan guru mengaji. Salah satu guru mengaji **Mihaya** yang berdomisili di Kambuno Selatan ketika peneliti mencoba menanyakan tentang tanggapan terhadap program strategis di bidang keagamaan mengatakan bahwa :

“Jika pemerintah desa pulau harapan menginginkan seluruh masyarakat yang ada didesa ini semua pandai mengaji, maka diharapkan dalam merancang program strategis dibidang keagamaan agar kiranya dapat melengkapi fasilitas-fasilitas Baca Tulis Al-Qur'an pada tempat yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri maupun yang dikelola oleh supaya tidak membebankan lagi kepada masyarakat misalnya harus membeli Al-Qur'an untuk anaknya”. (Wawancara Tanggal 09 Mei 2017).

5. Sarana dan Prasarana

Pembangunan Infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa untuk menyediakannya. Pada sebagian infrastruktur, pihak Desa telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat murni yang terkoordinir di masing-masing RT dan RW.

Tabel 7
Jumlah Prasarana Dan Sarana Desa
Tahun 2016

No	Jenis prasarana & sarana desa	Tahun 2015	Volume
1.	Jalan Rabat Beton	4	3,90 km
2.	Jalan Stepak/Kecil	0	0
3.	Dermaga Pantai/Tambatan perahu	5	150 m
4.	Gedung Pendidikan	7	7 gedung
5.	Gedung Serbaguna	1	0
6.	Gedung Posyandu	0	0
7.	Lapangan Sepakbola	1	1
8.	Bak Penampungan Air	0	0

Sumber : *Profil Desa Tahun 2016*

Untuk peningkatan perekonomian masyarakat maka diperlukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDA) dan pemamfaatan Sumber Daya Alam (SDM) serta

pengembangan Infrastruktur Desa, ini didukung dengan hasil wawancara kami dengan salah satu wakil ketua BPD **Rasmawati Muin, S. Pd** Mengatakan bahwa :

“Saya selaku salah satu perwakilan BPD Desa Pulau Harapan dalam rapat koordinasi program kerja desa pada tanggal 05 April 2016 menawarkan beberapa program kerja desa dalam menunjang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemamfaatan Sumber Daya Alam (SDA) itu semua tergantung dari Infrastruktur yang ada maka saya menawarkan diantaranya :

1. Pembangunan Bak Penampungan Air
2. Perbaikan Dermaga
3. Gedung Posyandu,
4. Pembangunan jalan Desa termasuk setapak
5. Pembangunan Drainase.
6. Perbaikan Gedung Pendidikan Utamanya Gedung TK.
7. Kelanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna.
8. Pembangunan Jembatan penghubung Kambuno – P. Liang-Liang
9. Penghijauan lapangan.

dan tak lupa bagaimana pemerintah desa bisa memamfaatkan hibah-hibah pemerintah yang diberikan pada masyarakat dengan melakukan proses pendampingan”. (Hasil Wawancara tanggal 09 Mei 2017).

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti mencoba melakukan Observasi untuk melihat progam strategis pemerintah desa tentang pengembangan Infrastruktur Desa diantaranya :

- a. Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasaran Pendidikan, Kesehatan dan Keamanan untuk mewujudkan masyarakat yang religius, sehat, mandiri , cerdas dan peka terhadap perubahan-perubahan .
- b. Peningkatan sarana dan prasarana jalan desa, kebersihan, Transportasi, Perumahan tidak layak huni, penyediaan air bersih, Drainase, seni dan olah raga.

6. Bidang Pemerintahan Umum

Desa pulau harapan termasuk salah satu desa di kecamatan pulau Sembilan kabupaten sinjai dan merupakan desa hasil pemekaran dari kelurahan pulau-pulau Sembilan pada tahun 2002 dengan luas wilayah 1,75 Km² berada pada keadan topografi kepulauan yang di kelilingi air laut.Secara singkat Sejarah Desa Pulau Harapan, sekitar pada tahun 1980an-Tahun 2001 Desa Pulau Harapan dalam hal ini Pulau Sembilan sebelumnya adalah sebuah kelurahan dikecamatan Sinjai Utara dibawah kepemimpinan (Lurah) H.Abd Gaffar dan setelah itu dilakukanlah pemekaran wilayah dimana Pulau Sembilan menjadi Kecamatan tersendiri dan Desa Pulau Harapan salah satu desa didalamnya. Sekitar tahun 2001-2012 Pasca

dilakukannya Pemekaran, maka Desa Pulau Harapan yang telah mendapat legitimasi sebagai desa dikecamatan Pulau Sembilan dimana masyarakatnya memberi kepercayaan kepada Muh.Tamar sebagai kepala Desa Pertama. Pada tahun 2012 kepala desa Muh. Tamar meninggal dunia dan digantikan oleh **Tanhar SH** yang merupakan Pelaksana tugas kepala desa sekaligus menjabat sebagai camat pulau Sembilan. Pada tahun 2013, kepemimpinan camat pulau Sembilan dan PLT Kepala Desa diambil alih oleh **Abdul Latif, S. Sos.** Pada tahun 2014 dilaksanakan pemilihan langsung kepala desa, maka terpilihlah **H. Ambo Sakka** sebagai kepala desa ke 2 untuk masa jabatan 2014-2020.

Desa Pulau harapan Yang Terletak di Pulau kambuno juga merupakan ibu kota Kecamatan Pulau Sembilan Sehingga, Di Sektor Pemerintahan Umum desa Pulau harapan sejak dimekarkan pada tahun 2002 Telah Aktif memberikan berbagai Pelayan Administrasi Kepada masyarakat, Pembagian Wilayah Di Desa Pulau harapan Terdiri Atas 2 Pulau Kecil yaitu Pulau Kambuno dan Pulau Liang – Liang dan Terbagi dalam 4 Dusun :

- a. Dusun kambuno Barat
- b. Dusun Kambuno Timur
- c. Dusun Kambuno Selatan
- d. Dusun Pulau Liang-Liang

Tabel 8
Nama Pejabat Wilayah Administrasi Pemerintah
Desa Pulau Harapan Tahun 2016

No	N a m a	Jabatan
1	H. Ambo Sakka	Kepala Desa
2	Anwar, S.Sos	Sekretaris Desa
3	Takbir	Bendahara
4	Irawati	Kepala Urusan Umum
5	Karmila.HM	Kepala Seksi Pemerintahan
6	Arham Ubais	Pembangunan
7	Sirajuddin, Shi	Kepala Seksi Kesejahteraan
8	M. Syukri	Kepala Dusun Kambuno Barat
9	Muh. Syahrir	Kepala Dusun Timur
10	Irfan Tamar	Kepala Dusun Kambuno selatan
11	Muh. Tahir	Kepala Dusun Pulau Liang-Liang

Sumber : Profil Desa Tahun 2016

Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Orkemas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis kemasyarakatan yang tidak bertujuan politis, istilah semula adalah "organisasi Massa" yang disingkat "Ormas". Namun sejak dikeluarkannya Permendagri nomor 33 tahun 2012 istilahnya diganti menjadi "organisasi Kemasyarakatan" dan disingkat "Orkemas", Orkemas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan, sosial, dan lain-lain.

Beberapa Organisasi atau Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Pulau Harapan diantaranya:

1. **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tabel 9
Nama Anggota Badan Permusyawaratan
Desa Pulau Harapan

No	Nama	Jabatan
1	SUKARMAN	Ketua
2	RASMAWATI MUIN	Wakil Ketua
3	NURHAYATI	Sekretaris
4	ST. JULMIA	Anggota
5	RUSDI	Anggota
6	MUH. LUTFI	Anggota
7	HASBI	Anggota

8	MUHDASING	Anggota
9	ABD. RAHMAN	Anggota
10.	MUH. BAKRI	Anggota
11.	RISNAWATI	Anggota

Sumber : *Profil Desa Tahun 2016*

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa

a. Pembentukan

- 1). Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- 2). Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dapat dibentuk atas prakarsa yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- 3). Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes).
- 4). Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

b. Tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan adalah :

- 1). Tercapai dan terpeliharanya nilai-nilai kehidupan masyarakat desa yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan.
- 2). Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa yang berdayaguna dan berhasilguna.
- 3). Terwujudnya kesejahteraan masyarakat atas dasar dukungan seluruh potensi swadaya masyarakat.
- 4). Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

c. Tugas Dan Fungsi

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

1). Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi :

- a). Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat menyelesaikan permasalahan yang ada dan mengoptimalkan potensi yang ada.
- b). Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
- c). Menggerakkan, memotivasi dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat.
- d). Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang ;

2). Fungsi Lembaga Kemasyarakatan :

- a). Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat d alam pembangunan.
- b). Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalamkerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c). Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pe merintah kepada masyarakat.
- d). Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e). Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotongroyong masyarakat.
- f). Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- g). Pemberdayaan hak politik masyarakat.
- h). Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang(narkoba) bagi remaja.
- i). Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa dan masyaraka

3. Pembinaan Kesajahteraan Keluarga (PKK)

a). Tujuan

Gerakan PKK Bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

b). Program Pokok PKK

- 1). Penghayatan dan Pengamalan Pacasila
- 2). Gotong royong
- 3). Pangan
- 4). Sandang
- 5). Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga
- 6). Pendidikan daan ketrampilan
- 7). Kesehatan
- 8). Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
- 9). Kelestarian Lingkungan hidup
- 10).Perencanaan sehat

Pokja I : Keagamaan, Pokja II : Pendidikan daan ketrampilaPokjaIII :

Sandang, Pangan Perumahan dan Tata laksana Rumah TanggaPokja IV :
Kesehatan.

4. Perlindungan Masyarakat / LINMAS

Dan masih ada Lembaga-lembaga lain Secara keseluruhan lembaga-lembaga desa terdiri dari seperti :

- a. LKMD
- b. PKK
- c. LINMAS
- d. KARANG TARUNA
- e. KELOMPOK TANI NELAYAN
- f. BUMDES

Dari data diatas Pemerintah Desa Pulau Harapan memfokuskan pada program strategis diantaranya :

1. Program Peningkatan Kualitas SDA aparat Desa.
2. Program Pelatihan tugas dan tanggungjawab Perangkat Desa.
3. Program Pembinaan perangkat Desa.
4. Perogram Peningkatan partisipasi lembaga-Lembaga desa dalam kegiatan pembangunan Desa.

Kesimpulan

Pemabhasan tentang strategis pemerintah bergaya wirausaha dalam membangun kemandirian masyarakat pada prinsipnya telah dilakukan pemerintah Desa Pulau Harapan dengan menerapkan beberapa pogram strategis antara lain, penguatan kelembagaan Desa, pemberdayaan kelompok masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program.

Daftar Pustaka

- Atmosoepipto, Kisdarto. 2000. *Menuju SDM Berdaya*. Edisi pertama Jakarta. Gramedia.
- Arikonto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta PT.
- Asriadi AR, 2013, *Strategi Enterpreneurial Government (Pemerintahan Bergaya Wirausaha) Pokok Pikiran Dalam Membangun Kemandirian Desa*, Sinjai
- Bryson John M, 2001, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Terjemahan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 1996, *Reinventing Government: Pokok-Pokok Pikiran dan Relevansinya di Indonesia*, Makalah Pada Pelatihan Manajemen Strategik bagi Direktur RSUD oleh Magister Manajemen Rumah Sakit, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 1997, *Pemerintah yang Efisien, Tanggap, dan Akuntabel: Kontrol atau Etika*, dalam JKAP, Vol.1 No.2, Yogyakarta.
- Glezer, Barney G. Anselm L. Strauss, 1976, *The Discovery of Grounded Theory, Strategy for Qualitative Research*, Chicago, Aldine Publishing Company.

- Goodman, Jon, 1993, *Kewirausahaan Dalam Perusahaan, Manajemen*, No.89.
- Hughes, Edgar, Owen, 1994, *Public Management And Administration*, St. Martin's, United States of America.
- John W Creswell, 2013, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta.
- Keban, Yeremias T., 2000, *Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan*, dalam *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, Jakarta.
- Lupiyoadi, Rambat dan Hasan, Bakir, 1999, *Disain Struktur Yang Mendukung Kewirausahaan Organisasi*, Man dan Usaha Ind 07.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta.
- Moleong, J, Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution.S, 1988, *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Noeng Muhadjir, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologistik Realisme Methaphisik*, PT.Rake Sarasin, Yokyakarta.
- Osborne, David dan Gaebler, Ted, 1995, *Mewirausahakan Birokrasi : mentranformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik jilid 2* (terjemahan), PPM, Jakarta.
- Osborne, David dan Plastrik, Peter, 2000, *Memangkas Birokrasi : lima strategi menuju pemerintahan wirausaha* (terjemahan), PPM, Jakarta,.
- Siagian P, Sondang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Siagian, P, Sondang, *Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi dan Terapinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Siregar, Edi, 1982, *The Dictionary of Political Analysis*, Terjemahan, CV.Rajawali, Jakarta
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi (Memahami Penelitian Kualitatif)*. Bandung; Alfabeta
- Takhlisus Khotib (2011) *Strategi Dalam Menumbuhkan Semangat Jiwa Kewirausahaan Masyarakat (Study Kasus di Desa Grabag Kabupaten Magelang)*, Magelang.
- Toha, Miftah, 1997, *Restrukturisasi dan Revitalisasi Administrasi Negara Dalam Menyongsong Era Globalisasi*, Orasi Ilmiah pada Program Pasca UNPAD, Bandung.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2001, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, Jakarta.

Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Vredembregt, Jacob, 1980, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.